

**DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM :
STUDI MASYARAKAT DI PULAU MADURA**

Dwi Intan Cantika Putri Hendrayana¹, Eka Nova Yulianti^{2*},

Arina Dinana³, Moh Busrowi⁴

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

230721100075@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

*Income distribution and poverty remain structural problems in Indonesia's economic development, including on Madura Island. This study aims to analyse income distribution patterns and the causes of poverty in Madura from an Islamic economic perspective, as well as the role of Islamic social finance instruments in reducing inequality and improving welfare. The study uses a descriptive qualitative approach through literature review with content analysis and thematic interpretation of academic sources and documents from socio-religious institutions such as BAZNAS and BMT. The results show that income inequality is influenced by structural factors, such as low education, limited employment opportunities, and access to capital, as well as cultural factors, such as traditional lifestyles and low Islamic financial literacy. This study emphasises the importance of optimising Islamic social finance, strengthening Islamic economic literacy, and community-based empowerment to achieve fair and sustainable income distribution in accordance with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*.*

Keywords: *Income Distribution, Poverty, Islamic Economics, Zakat, Madura Island.*

Abstrak

Distribusi pendapatan dan kemiskinan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di Pulau Madura. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola distribusi pendapatan dan faktor penyebab kemiskinan di Madura dari perspektif ekonomi Islam, serta peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan analisis isi dan interpretasi tematik terhadap sumber akademik dan dokumen lembaga sosial-keagamaan seperti BAZNAS dan BMT. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan akses modal, serta faktor kultural, seperti pola hidup tradisional dan rendahnya literasi keuangan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi keuangan sosial Islam, penguatan literasi ekonomi Islam, dan pemberdayaan berbasis komunitas untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata kunci: *Distribusi Pendapatan, Kemiskinan, Ekonomi Islam, Zakat, Pulau Madura*

Pendahuluan

Distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan isu fundamental dalam pembangunan ekonomi yang terus menjadi perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan, terutama ketika mekanisme distribusi tidak berjalan secara adil dan inklusif. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang, memperlemah kohesi sosial, dan memperbesar risiko kemiskinan struktural (Todaro & Smith, 2020; World Bank, 2023).

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan antarwilayah masih menjadi persoalan yang menonjol meskipun stabilitas ekonomi makro relatif terjaga. Pembangunan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah dengan basis ekonomi agraris dan perdesaan tertinggal dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang merata.

Pulau Madura merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait distribusi pendapatan dan kemiskinan. Struktur ekonomi Madura didominasi oleh sektor pertanian lahan kering, perikanan tradisional, serta usaha mikro dan kecil yang memiliki produktivitas relatif rendah. Keterbatasan sumber daya alam, teknologi produksi yang sederhana, dan minimnya diversifikasi usaha menyebabkan pendapatan masyarakat cenderung rendah dan tidak stabil (Hadi Priyono et al., 2022).

Selain faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja non-pertanian dan rendahnya kualitas sumber daya manusia turut memperkuat permasalahan kemiskinan di Madura. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi mobilitas sosial dan peluang masyarakat untuk keluar dari sektor informal berproduktivitas rendah. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa praktik pernikahan dini berkontribusi terhadap rendahnya pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan antargenerasi di wilayah Madura (Kurniawan & Prabowo, 2022).

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Fakta ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara merata dan

masih terdapat kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2023; Hadi Priyono et al., 2022).

Dalam literatur ekonomi konvensional, distribusi pendapatan umumnya dianalisis melalui mekanisme pasar, kebijakan fiskal, dan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau program bantuan sosial. Namun, pendekatan ini sering kali bersifat materialistik dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi etika dan moral yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (Stiglitz, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih holistik dalam memahami persoalan ketimpangan dan kemiskinan.

Ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memandang distribusi pendapatan. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Prinsip *'adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam (Chapra, 2000; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Al-Qur'an secara tegas menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, yang menyatakan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ayat ini memberikan dasar normatif bagi sistem distribusi pendapatan yang adil dan inklusif. Dalam pandangan ekonomi Islam, harta dipandang sebagai amanah sosial yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Fahrudin, 2023).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi Islam berfungsi menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Nilai ini mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses distribusi kekayaan (Yasen, 2023; Hukum et al., 2018). Dengan demikian, keadilan distributif dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan ekonomi.

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dirancang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Zakat berperan langsung dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menyalurkan sebagian kekayaan kelompok mampu kepada kelompok miskin dan rentan. Wakaf produktif, di sisi lain, berpotensi menciptakan sumber daya

ekonomi jangka panjang yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Sari et al., n.d.; Fitri et al., 2025).

Selain itu, ekonomi Islam melarang praktik riba, monopoli, dan penimbunan harta (*iktinaz*) karena dapat memperparah ketimpangan dan menciptakan ketidakadilan struktural. Larangan ini bertujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara etis dan mendorong perputaran kekayaan yang produktif di tengah masyarakat (Chapra, 2000; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dalam konteks kemiskinan, Islam memandang *al-faqr* tidak hanya sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan lemahnya posisi sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam Islam merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, lembaga sosial, dan masyarakat (Ritonga & Azzaki, 2025).

Konsep kesejahteraan (*falah*) dalam Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terciptanya keadilan sosial, martabat manusia, dan keberlanjutan kehidupan sosial (Ritonga & Azzaki, 2025; Iqtada Binnabie et al., 2025).

Meskipun ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual dan instrumen yang kuat, kajian empiris yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dengan realitas ekonomi agraris masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian ekonomi Islam masih bersifat normatif, sementara studi empiris sering kali mengabaikan konteks sosial dan budaya lokal (Fitri et al., 2025).

Dalam konteks Pulau Madura, penelitian yang secara khusus mengkaji distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam masih jarang ditemukan. Padahal, karakteristik sosial dan religius masyarakat Madura sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan tersebut (Hadi Priyono et al., 2022; Kurniawan & Prabowo, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, integrasi antara teori distribusi pendapatan Islam dan ekonomi agraris masih minim. Secara empiris, kajian yang mengaitkan kondisi sosial-ekonomi Madura dengan kerangka ekonomi Islam belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan masyarakat Madura dalam perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi faktor-

faktor struktural dan kultural yang memengaruhi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Kajian Teori

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merujuk pada pola pembagian pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu perekonomian. Dalam ekonomi pembangunan, distribusi pendapatan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi ketika sebagian besar pendapatan nasional terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain hanya memperoleh bagian yang relatif kecil (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks negara berkembang, ketimpangan distribusi pendapatan sering kali dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang timpang, perbedaan akses terhadap pendidikan dan modal, serta dominasi sektor informal berproduktivitas rendah (Stiglitz, 2019). Oleh karena itu, distribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan dan karakteristik sosial-ekonomi suatu wilayah.

Di Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan juga memiliki dimensi spasial, di mana wilayah dengan basis ekonomi agraris dan keterbatasan infrastruktur cenderung mengalami tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan dan institusional yang komprehensif (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik kebutuhan material maupun non-material. Dalam literatur ekonomi, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sumber daya produktif lainnya (World Bank, 2023).

Kemiskinan dapat bersifat absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan minimum, sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan antarindividu atau antarkelompok dalam masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga dapat bersifat struktural ketika disebabkan oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil, serta bersifat kultural ketika dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks wilayah agraris seperti Madura, kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan aset produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan terhadap risiko alam dan pasar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kemiskinan bersifat persisten dan sulit diatasi tanpa intervensi struktural yang berkelanjutan (Hadi Priyono et al., 2022).

Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang distribusi pendapatan sebagai bagian integral dari sistem keadilan sosial. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan terpenuhinya prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Dalam pandangan ini, harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Chapra, 2000).

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan distributif sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, yang melarang peredaran harta hanya di kalangan orang-orang kaya. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi sistem distribusi pendapatan dalam Islam yang menolak konsentrasi kekayaan dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Fahrudin, 2023). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada mekanisme pasar, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai moral dan spiritual sebagai pengendali aktivitas ekonomi. Prinsip *tawazun* (keseimbangan) menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga distribusi pendapatan tidak merugikan kelompok lemah dan rentan (Yasen, 2023).

Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menyediakan instrumen-instrumen khusus yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi kekayaan. Zakat merupakan instrumen utama yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Zakat tidak hanya

bersifat karitatif, tetapi juga berpotensi mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendekatan produktif (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Selain zakat, instrumen infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menyediakan sumber daya ekonomi jangka panjang. Wakaf produktif, misalnya, dapat digunakan untuk pengembangan aset ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial yang berkelanjutan (Sari et al., n.d.). Dengan demikian, instrumen ekonomi Islam berfungsi sebagai pelengkap kebijakan publik dalam menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil.

Ekonomi Islam juga melarang praktik riba, monopoli, dan penimbunan harta (*iktinaz*) karena berpotensi memperparah ketimpangan dan menciptakan ketidakadilan struktural. Larangan ini bertujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara etis dan mendorong sirkulasi kekayaan yang produktif di masyarakat (Chapra, 2000).

Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan (*al-faqr*) tidak hanya dipahami sebagai kekurangan material, tetapi juga sebagai kondisi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan ketidakberdayaan sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, lembaga sosial, dan masyarakat (Ritonga & Azzaki, 2025).

Tujuan akhir pembangunan ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan (*falah*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Konsep *falah* menempatkan keadilan sosial dan martabat manusia sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi (Ritonga & Azzaki, 2025).

Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya *al-tamkin al-insani* (pemberdayaan manusia), yaitu upaya meningkatkan kapasitas individu agar mampu mandiri secara ekonomi dan berperan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan (Iqtada Binnabie et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial ekonomi masyarakat Madura dalam konteks distribusi pendapatan dan kemiskinan, bukan pada pengukuran statistik semata.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pengumpulan data sekunder dari: Jurnal dan literatur ekonomi Islam, Laporan sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Desa, Penelitian terdahulu mengenai struktur ekonomi Madura.

Analisis data dilakukan dengan content analysis dan pendekatan interpretatif, yakni mengaitkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kondisi sosial ekonomi empiris masyarakat Madura untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Distribusi Pendapatan di Pulau Madura

Distribusi pendapatan di Pulau Madura hingga kini masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Berdasarkan berbagai studi ekonomi daerah dan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar masyarakat Madura menggantungkan hidup pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian lahan kering, perikanan, serta usaha kecil di sektor informal dengan tingkat produktivitas rendah. Rata-rata pendapatan penduduk pedesaan Madura masih berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. (R. L. Sari et al., 2019) Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah kepulauan tersebut.

Akar dari ketimpangan pendapatan ini dapat ditelusuri pada struktur ekonomi Madura yang masih didominasi oleh sektor primer dan belum mengalami diversifikasi yang memadai. Rendahnya tingkat industrialisasi dan minimnya investasi swasta menyebabkan peluang kerja formal dan pendapatan stabil masih terbatas. Selain itu, ketimpangan geografis juga memperparah kesenjangan, di mana wilayah utara yang memiliki akses transportasi laut dan perdagangan lebih baik cenderung lebih maju dibandingkan wilayah selatan yang relatif terisolasi.

Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menggambarkan belum terwujudnya prinsip 'adl (keadilan) dan masalahah 'ammah (kemaslahatan umum) dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat (2776-8022-1-PB (Ref2), n.d.-a). Islam memandang keadilan ekonomi bukan hanya sebatas pemerataan hasil, tetapi juga pada aspek pemerataan akses terhadap faktor produksi seperti tanah, pendidikan, lapangan kerja, dan modal. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem dapat

menimbulkan kerusakan sosial (fasād) serta menghambat tercapainya kesejahteraan yang hakiki (falāh). Oleh karena itu, Islam mendorong adanya kebijakan redistributif dan sistem ekonomi yang menjamin setiap individu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensinya.

Faktor Penyebab Kemiskinan di Madura

Kemiskinan di Madura merupakan hasil dari kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan struktural yang saling berkaitan. Tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja yang produktif, serta lemahnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Secara lebih rinci, faktor-faktor utama penyebab kemiskinan di Madura antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya alam dan rendahnya produktivitas lahan.

Sebagian besar wilayah Madura terdiri dari lahan kering dengan tingkat kesuburan rendah, sehingga kegiatan pertanian kurang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha tani tradisional dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (R. L. Sari et al., 2019).

2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan.

Tingkat partisipasi sekolah di Madura masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur. Banyak anak muda yang berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam pasar kerja modern, sehingga mayoritas tenaga kerja terjebak dalam pekerjaan berupah rendah (Tharissa Az Zachra et al., n.d.-a).

3. Budaya ekonomi tradisional.

Pola kerja masyarakat Madura masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan kebiasaan turun-temurun, termasuk dalam hal pengelolaan usaha dan investasi. Sikap konservatif terhadap inovasi dan teknologi baru menjadi penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal (Tharissa Az Zachra et al., n.d.-b).

4. Minimnya akses terhadap permodalan dan infrastruktur ekonomi.

Keterbatasan lembaga keuangan mikro, akses transportasi yang sulit, serta infrastruktur pasar yang belum memadai membuat kegiatan ekonomi berjalan lambat dan tidak efisien. Selain itu, masih

banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pinjaman modal karena keterbatasan agunan (Fuadi, 2018).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan struktural seperti ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem distribusi kekayaan. Islam menekankan pentingnya keadilan distributif, yaitu sistem yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional sesuai usaha dan kebutuhannya (2776-8022-1-PB (Ref2), n.d.-b). Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menanggulangi ketimpangan tersebut melalui program pemberdayaan sosial, pendidikan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada kaum lemah (mustadh'afin). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai tantangan moral dan sosial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Upaya Islam dalam Mengatasi Ketimpangan dan Kemiskinan (Selain Zakat)

Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh tidak hanya mengandalkan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, tetapi juga menawarkan berbagai mekanisme lain yang mampu mengatasi ketimpangan dan kemiskinan secara struktural. Beberapa di antaranya mencakup aspek hukum, sosial, dan kelembagaan yang bersifat komplementer.

Larangan riba, gharar, dan monopoli.

Islam melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan monopoli karena ketiganya menyebabkan akumulasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Larangan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial (2776-8022-1-PB (Ref2), n.d.-b). Dalam konteks Madura, penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau koperasi syariah yang menyalurkan pembiayaan berbasis profit-loss sharing (Niswah & Assadam, n.d.).

Sistem waris yang adil.

Pembagian harta waris dalam Islam didesain agar kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak atau keluarga. Dengan distribusi yang proporsional sesuai ketentuan syariah, kekayaan dapat tersebar ke lebih banyak individu sehingga memperkecil kesenjangan sosial. Hal ini juga memperkuat solidaritas keluarga dan sosial.

Wakaf produktif dan hibah sosial.

Wakaf dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk kegiatan ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Misalnya, wakaf tanah untuk lahan pertanian kolektif, lembaga pendidikan, klinik kesehatan, atau usaha kecil. Pengelolaan wakaf secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat miskin (Fuadi, 2018).

Peran negara melalui baitul mal.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki lembaga keuangan publik bernama baitul mal yang berfungsi mengelola dana zakat, pajak syariah (kharaj, jizyah, dan ushr), serta sumber daya alam untuk kesejahteraan umum. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi bagi fakir miskin, serta investasi sosial produktif (Tharissa Az Zachra et al., n.d.-b). Prinsip ini jika diadaptasi dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat bawah.

Peningkatan etos kerja dan tanggung jawab sosial.

Islam memandang bekerja sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Etos kerja yang tinggi dan semangat saling menolong (ta'āwun) dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk keluar dari kemiskinan. Nilai ini menumbuhkan kemandirian dan solidaritas, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, kombinasi instrumen-instrumen tersebut membentuk sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan distribusi pendapatan di Madura dapat menjadi lebih merata, dan tingkat kemiskinan dapat berkurang secara berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Pulau Madura merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan kultural, seperti rendahnya produktivitas sektor tradisional, keterbatasan akses pendidikan dan modal, serta lemahnya infrastruktur ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yang menempatkan keadilan distribusi sebagai prasyarat utama

kesejahteraan. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan komprehensif dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan melalui mekanisme redistributif seperti zakat, wakaf produktif, baitul mal, serta penguatan nilai moral dan pemberdayaan manusia (*al-tamkin al-insani*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan di Pulau Madura. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian distribusi pendapatan dalam perspektif Islam, namun masih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi lapangan diperlukan untuk memperdalam analisis implementasi ekonomi Islam dalam konteks lokal secara empiris dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Provinsi Jawa Timur September 2023. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.
- Ekonomi, F., & Islam, B. (2024). Application of the Principles of Justice in the Distribution of Wealth: A Literature Review of Contemporary Islamic Economics Fahrudin Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1586–1596.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/1586>
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Janna Ritonga, M., & Adnan Azzaki, M. (n.d.). *Neraca*.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Fitri, K., Sinka, V., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia*. 59–71.
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1237>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hadi Priyono, T., Yunitasari, D., Wibisono, S., Purtomo Somaji, R., Istiyani, N., Santoso, E., & Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, B. (2022). Analysis of Poverty Determination in Madura 2010-2019 Media Trend. *MediaTrend*, 17(2), 433–449.
<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v17i1>
- Hukum, J., Syariah Volume, E., Nomor, |, Juli, |, Yasen, S., & Syariah, E. (2018). *J-HES INTERNALIZATION OF BALANCE AND JUSTICE VALUE SHARIA ECONOMIC SYSTEM IN INDONESIA J-HES*. 2(2), p-ISSN.

- Iqtada Binnabie, A., sutrisno, E., Manajemen Zakat dan Wakaf, J., & Iqtada, A. (2025). *Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society* (Vol. 2, Issue 6).
- Kurniawan, I., & Prabowo, P. S. (2022). THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL AND EARLY MARRIAGE RATE ON POVERTY: CASE STUDY MADURA ISLAND. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 7(1). <https://doi.org/10.31002/rep.v7i1.64>
- Maiza Putra, H., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., Slamet, M., Al-Falah Cicalengka, S., Miftahul Huda Al Azhar Banjar, S., & Barat, J. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 1). www.dbs.id
- Niswah, F. M., & Assadam, E. (n.d.). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf The Strategy of Cash Waqf Development for Financing Farmers*.
- Sari, N., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (n.d.). *Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam*. 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3272>
- Sari, R. L., Khoirudin, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Dahlan, U. A. (2019). DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU MADURA. In *Jurnal Manajemen* (Vol. 9, Issue 2). setiawan_iwan,+7.+Risna+Nurhaida+hafni+233-242. (n.d.).
- Syahputra, A., Harahap, I., M. Nawawi, Z., & Kaswinata, K. (2023). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 144–161. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>
- Tharissa Az Zachra, A., Putri Rahma Damayanti, A., Dwi Cahyani, E., Gading Pramesti, L., & Susilo, S. (n.d.-a). *Pengaruh Pengembangan Sektor Basis Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan*. 2(2).
- Tharissa Az Zachra, A., Putri Rahma Damayanti, A., Dwi Cahyani, E., Gading Pramesti, L., & Susilo, S. (n.d.-b). *Pengaruh Pengembangan Sektor Basis Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan*. 2(2).